

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DI KABUPATEN
BANYUWANGI, KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN MADIUN,
SERTA KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan



Oleh :

Ardhana Nikwari
1011010037/FE/IE

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2014

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DI KABUPATEN BANYUWANGI, KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN MADIUN SERTA KABUPATEN TUBAN

Disusun Oleh :

Ardhana Nikwari
NPM 1011010037

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima
oleh Tim Penguji Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal : 14 Maret 2014

Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji :
Ketua

Prof. Dr. Syamsul Huda, SE, MT

Prof. Dr. Syamsul Huda, SE, MT
Sekertaris

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP
Anggota

Dr. Ec. Wiwin Priana, MT

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Drs. H. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM
NIP 196309241989031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul:

“Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Madiun Serta Kabupaten Tuban”.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti dengan kerendahan hati yang tulus ikhlas mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada banyak pihak, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan banyak bantuan berupa sarana fasilitas dan perijinan guna pelaksanaan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih,MP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Huda, SE, MT selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan didalam perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan dan pelayanan akademik bagi peneliti.
6. Secara khusus saya persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat saya sayangi. Romo dan Ibu. Terimakasih buat semua kasih sayang, doa, pengorbanan dan semangat yang telah diberikan.
7. Kepada suami dan putra saya yang sangat sayangi. Terimakasih telah menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada para teman-teman saya angkatan 2010 khususnya yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya yang telah mengerjakan skripsi hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian skripsi ini diusahakan sesuai dengan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkan serta bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, Maret 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstraksi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	11
2.2.1. Pengertian Desentralisasi Fiskal.....	11
2.2.2. Otonomi Daerah	13

2.2.2.1. Definisi Otonomi Daerah	13
2.2.2.2. Tujuan Otonomi Daerah.....	15
2.2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	18
2.2.3.1. Pengertian dan Unsur-unsur APBD	18
2.2.3.2. Struktur APBD	19
2.2.4. Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.2.4.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.2.4.2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah	21
2.2.5. Dana Perimbangan.....	35
2.2.5.1. Dana Bagi Hasil.....	36
2.2.5.2. Dana Alokasi Umum (DAU).....	36
2.2.5.3. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	39
2.3. Kerangka Pikir	40
2.4. Hipotesis	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi operasional dan Pengukuran variabel	43
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	44

3.2.1. Jenis Dan Sumber Data.....	44
3.2.2. Pengumpulan Data.....	45
3.3. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis	45
3.3.1. Indeks Desentralisasi Fiskal	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian	50
4.1.1. Kabupaten Banyuwangi	50
4.1.1.1. Keadaan Geografis Kabupaten Banyuwangi	50
4.1.1.2. Kependudukan Kabupaten Banyuwangi.....	51
4.1.2. Kabupaten Blitar	52
4.1.2.1. Keadaan Geografis Kabupaten Blitar	52
4.1.2.2. Kependudukan Kabupaten Blitar	53
4.1.3. Kabupaten Madiun	53
4.1.3.1. Keadaan Geografis Kabupaten Madiun	53
4.1.3.2. Kependudukan Kabupaten Madiun	54
4.1.4. Kabupaten Tuban	55
4.1.4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Tuban	55

4.1.4.2. Kependudukan Kabupaten Tuban	55
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	56
4.2.1. Perkembangan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	56
4.2.2. Perkembangan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blitar	57
4.2.3. Perkembangan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Madiun	58
4.2.4. Perkembangan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tuban	59
4.3. Analisis Dan Pengujian Hipotesis.....	60
4.3.1. Uji Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal.....	60
4.3.1.1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Madiun Serta Kabupaten Tuban	60
4.3.1.2. Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Madiun Serta Kabupaten Tuban.....	64
4.3.1.3. Rasio Sumbangan Daerah (SD) Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Madiun Serta Kabupaten Tuban	69

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal.....	51
3.2. Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	53
4.1. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	60
4.2. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blitar.....	61
4.3. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Madiun.....	62
4.4. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tuban.....	63
4.5. Rasio PAD terhadap TPD, Rasio BHPBP terhadap TPD, Rasio SB terhadap TPD pada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban Tahun 2009.....	64
4.6. Rasio PAD terhadap TPD, Rasio BHPBP terhadap TPD, Rasio SB terhadap TPD pada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban Tahun 2010.....	66
4.7. Rasio PAD terhadap TPD, Rasio BHPBP terhadap TPD, Rasio SB terhadap TPD pada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban Tahun 2011.....	67
4.8. Hasil Perhitungan Kontribusi PAD dan Kontribusi BHPBH terhadap Kontribusi SB Untuk Mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Fiskal) Tahun 2009.....	69

4.9. Hasil Perhitungan Kontribusi PAD dan Kontribusi BHPBH terhadap Kontribusi SB Untuk Mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Fiskal) Tahun 2010.....	70
4.10. Hasil Perhitungan Kontribusi PAD dan Kontribusi BHPBH terhadap Kontribusi SB Untuk Mengetahui Derajat Desentralisasi Fiskal (Kemandirian Fiskal) Tahun 2011.....	71
4.11. Hasil Perhitungan Untuk Mengetahui Tingkat Kemandirian Daerah.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Kerangka Pikir.....	41
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
- Lampiran 2 : Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
- Lampiran 3 : Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun
- Lampiran 4 : Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
- Lampiran 5 : Rata-rata Rasio PAD Terhadap TPD, BHPBP Terhadap TPD dan Rasio SD Terhadap TPD Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban.
- Lampiran 6 : Sektor Pertanian Lumbung Kedelai Nasional Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
- Lampiran 7 : Sektor Perdagangan Pasar Legi Kabupaten Blitar.
- Lampiran 8 : Sektor Industri Brem Kabupaten Madiun.
- Lampiran 9 : Sektor Pertambangan Bukit Kapur Kabupaten Tuban.

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DI KABUPATEN BANYUWANGI, KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN MADIUN SERTA KABUPATEN TUBAN

Oleh

Ardhana Nikwari

Abstraksi

Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban diperlukan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan penerimaan daerah, perlu diadakan analisis potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan terhadap Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan Daerah.

Agar dapat menopang penerimaan daerah digunakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), dan rasio Sumbangan Daerah (SD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, BHPBP, SD, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban. Teknik analisa yang digunakan yaitu Indeks Desentralisasi Fiskal, sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan BPS (Badan Pusat Statistik).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dengan perhitungan Indeks Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil bahwa kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban masih belum mandiri karena peranan PAD dan juga BHPBP sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan bantuan dana dari pusat. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban adalah pola hubungan insruktif.

Kata kunci : Desentralisasi fiskal, Kemandirian, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan di daerah akhir-akhir ini, membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang di kenal dengan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. (Haryati, 2006 : 1)

Alasan-alasan yang menyebabkan lahirnya tuntutan tersebut. Adalah pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintahdaerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua,

otonomi daerah merupakan jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana globalization cascade sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2002 : 3-4).

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan melihat berbagai potensi yang ada dan harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Mengingat keterbatasan tenaga yang profesional maupun dana yang tersedia maka Pembangunan Nasional dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Kondisi yang demikian itu akan mendorong para pelaku pembangunan untuk lebih berorientasi kepada kemampuan sendiri. Dengan mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas Desentralisasi maka dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, berdaya guna, dan berhasil guna maka dibentuklah Daerah Otonomi (Anonim, 2004 : 8)

Otonomi bagi daerah mempunyai banyak tujuan, salah satunya adalah guna menambah kelancaran pembangunan di daerah dan terciptanya suatu kesinambungan pertumbuhan pembangunan yang dicapai serta pemerataan hasil-hasilnya. Guna mewujudkan fenomena diatas satu hal yang harus dimiliki oleh daerah yaitu kemampuandalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar. Kebutuhan

penyediaan dan pembangunan ini dirasa sangat penting dan relevan dengan konsepsi Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab karena pada dasarnya yang hendak dibangun serta ditingkatkan adalah kekuatan pembangunan dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Madiun maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu diadakan analisis potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan terhadap Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak agar dapat menopang dari suatu penerimaan daerah tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut adalah indikator desentralisasi fiskal. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total penerimaan daerah.

Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat. Adapun PAD pada Kabupaten Banyuwangi tahun 2009 adalah Rp. 1.049.309.732,-, pada

tahun 2010 PAD Kabupaten Banyuwangi meningkat sebesar Rp. 1.060.226.491,-, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.211.463.765,-. PAD Kabupaten Blitar pada tahun 2009 sebesar Rp. 901.207.592,-, tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 928.965.249,-, PAD Kabupaten Blitar tahun 2011 mengalami peningkatan Rp. 1.118.580.455,-. Pada Kabupaten Madiun tahun 2009 PAD sebesar Rp. 638.594.835,-, pada tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 683.032.120,-, kemudian pada tahun 2011 PAD meningkat menjadi Rp. 861.905.959,-. PAD Kabupaten Tuban tahun 2009 adalah Rp. 752.572.365,-, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 821.582.427,-, pada tahun 2011 PAD Kabupaten Tuban juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.049.552.188,-. (Anonim, 2011 : 515-544)

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Oleh karena itu untuk terciptanya kemandirian pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Madiun, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dengan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Madiun dalam masa otonomi daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul Skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Madiun Serta Kabupaten Tuban.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat mendukung Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban untuk menuju mandiri ?
2. Apakah BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) dapat mendukung Kabupaten banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban untuk menuju mandiri ?
3. Apakah SD (Sumbangan Daerah) dapat mendukung Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban untuk menuju mandiri ?
4. Apakah indeks desentralisasi fiskal di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban sudah mandiri ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mendukung Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban menjadi daerah yang mandiri.
2. Untuk mengetahui BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) dapat mendukung Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban menjadi daerah yang mandiri.
3. Untuk mengetahui SD (Sumbangan Daerah) dapat mendukung Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban menjadi daerah yang mandiri.
4. Untuk mengetahui indeks desentralisasi fiskal di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban sudah mandiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan di atas maka dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Serta masukan dalam rancangan penyusunan keuangan daerah (APBD) dalam program pembangunan.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tuban serta Kabupaten Blitar dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Madiun, serta Kabupaten Tuban, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban.
3. Sebagai sumber atau bahan informasi bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya dan dapat memberikan manfaat yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Sebagai bahan penerapan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung serta dapat membandingkan dengan kenyataan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Tuban.